

**PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUP DI
KABUPATEN SUMENEP
(STUDI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMENEP)**

*SERVICE SERVICE WITH CARE IN INCREASE SOCIETY HEALTH CARE
(STUDI AT PUSKESMAS LENTENG SUMENEP'S REGENCY)*

Oleh
Widrus Sajarah¹ Ida Syahriyani²,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja
widrussajarah@gmail.com

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Di Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep, mampu memanfaatkan kondisi masyarakat PMKS lebih sejahtera yaitu 1) Menciptakan suasana masyarakat berkembang yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dalam memberdayakan masyarakat PMKS, salah satunya penguatan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada wanita rawan sosial ekonomi, pemulung dan bagi pedagang kecil, dan anak terlantar, 2) Memperkuat potensi daya masyarakat PMKS yang diberdayakan Pemerintah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana peralatan untuk kewirausahaan serta peralatan sekolah bagi anak kurang mampu, 3) Memberdayakan dan melindungi masyarakat PMKS, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep untuk berkembang dan terus berkarya dalam kewirausahaan mandiri.

ABSTRACT

Result observationaling to point out Penyandang's Empowerment social welfare Problem (PMKS) In Increase Life welfare At Regency Sumenep that executed on duty Social, Female empowerment and Sumenep's Regency Child, which is 1) Creating effloresce society atmosphere that executed on duty Social, Female empowerment and Regency Child protection Sumenep in empower PMKS'S society, one of it support programs Productive Economy Effort (UEP) to economic social gristle woman, pemulung and divides little business man, and waif, 2) Strengthen society energy potencies PMKS who empowered by Government via on duty Social, Female empowerment and Regency Child protection Sumenep by gives medium help and prasarana is equipment for kewirausahaan and school equipment for indigent child, 3) Empower and protect PMKS'S societies, On duty Social, Female empowerment and Regency Child protection Sumenep to amends and continually does work deep kewirausahaan independent.

Key word : Society empowerment, Social welfare and PMKS

1. PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 10 yang berbunyi Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 10. 2009). Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan masalah yang menghambat seseorang untuk melaksanakan fungsi sosial sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Penanganan masalah pemberdayaan PMKS perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan suatu kebutuhan bagi upaya penyelesaian masalah kehidupan masyarakat mulai dari masalah kemiskinan sampai masalah kesejahteraan sosial.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep merupakan suatu unsur perangkat daerah dalam bidang sosial yang menangani masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat, seperti Pemberdayaan PMKS, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

dan Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) maupun Pemberdayaan Disabilitas serta Pemberdayaan Lanjut Usia dan Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM).

Pemberdayaan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep melalui 2 bidang yaitu Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial. Dalam pemberdayaan kepada PMKS, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep memberikan sarana dan prasana kewirausahaan dan memberikan bantuan modal usaha maupun memberikan pendampingan untuk bisa dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Prakteknya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep memberikan Standart Pelayanan Minimum terkait masalah-masalah kesejahteraan sosial, membantu meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu keluarga fakir miskin, anak jalanan, tuna asusila, gelandangan, anak terlantar, dan disabilitas, keluarga berumah tidak layak huni dan beberapa masalah-masalah sosial lainnya. (Interview dengan Bapak Fajar Kabid, 06 November 2023, di ruang kerjanya).

Adapun hambatan dalam pemberdayaan PMKS, sulitnya dalam pendataan sasaran, terutama para gelandangan dan anak jalanan atau anak terlantar, diberi pembinaan dan bantuan, setelah itu mereka kembali lagi menjadi PMKS, dengan alasan bantuan yang diberikan kurang cukup

dalam menghidupi dirinya sendiri. Selain itu para anak jalan atau terlantar, mereka dengan kehidupan yang bebas, walaupun telah dilakukan pembinaan dan rehabilitasi mental, namun mereka kembali dalam kehidupan yang bebas.

Berdasarkan observasi awal di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep, telah melakukan program dan kegiatan dengan pemberdayaan PMKS dengan diberi bantuan sosial berupa uang tunai maupun barang, akan tetapi masih banyak lagi PMKS yang masih kena razia, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep, kembali lagi memberikan arahan dan motivasi hidup untuk kembali lagi pada kehidupan yang layak.

Berdasarkan pemaparan diatas, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang lebih serius melalui pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan hak para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penanganan ini dimaksudkan agar masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memperoleh kesejahteraan sosial yang lebih baik yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat itu sendiri dapat melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat

menumbuh kembangkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Dengan kata lain pemberdayaan (*empowering*) adalah menciptakan masyarakat miskin menjadi masyarakat yang mampu dan mandiri. Pemberdayaan tidak hanya meliputi penguatan individu saja melainkan juga pranata-pranatanya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi merupakan tata kelola administrasi yang biasanya dipakai dalam berbagai organisasi publik yang dilaksanakan dengan kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan; dan administrasi ini mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik; Sangat erat kaitannya dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. (Pasolong, 2018:8)

Sedangkan Herbert Simon dalam Pasolong (2016:14) membagi empat prinsip administrasi yang lebih umum yaitu :

1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas dikalangan kelompok.
2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hirarki yang pasti
3. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.
4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan,

proses, langganan, tempat.

Pelayanan publik menurut Sinambela (2015:5) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Gronroos (dalam Ratminton, 2016 : 2) pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh organisasi pemberi pelayanan yang dimaksudnya untuk memecahkan permasalahan konsumen dan pelanggan.

Dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal :
 - a. Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik
 - b. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan
 - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran
 - d. Kesederhanaan
3. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan,.

Menurut Mubarak
(2016:43) pemberdayaan

masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kukasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2015:60).

Konsep pemberdayaan dapat dikatakan merupakan jawaban atas realitas ketidakberdayaan (*disempowerment*). Mereka yang tidak berdaya jelas adalah pihak yang tidak memiliki daya atau kehilangan daya. Mereka yang tidak berdaya adalah mereka yang kehilangan kekuatannya. Secara lebih lengkap suatu pemberdayaan memiliki maksud untuk :

1. Pemberdayaan bermakna kedalam, kepada masyarakat berarti suatu usaha untuk mentransformasikan kesadaran rakyat sekaligus mendekatkan masyarakat

dengan akses untuk perbaikan kehidupan mereka.

2. Pemberdayaan bermakna keluar sebagai suatu upaya untuk menggerakkan perubahan kebijakan - kebijakan yang selama ini nyata-nyata merugikan masyarakat. Pemberdayaan dalam segi ini bermakna sebagai pengendali yang berbasis pada upaya memperlebar ruang partisipasi rakyat (Pambudi, 2015:54-58)

Pendekatan

pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people centered development*) melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal, yang merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya. Dalam hal ini, Moelyarto (2016:37-38) mengemukakan ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumber daya lokal yang berbasis masyarakat, meliputi :

1. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi masyarakat setempat dibuat ditingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Fokus utama pengelolaan sumber daya lokal adalah memperkuat kemampuan

masyarakat miskin dalam mengarahkan aset-aset yang ada dalam masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan yang dengan sentralistik.
4. Budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi-organisasi yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi.
5. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri, yang mencakup kelompok penerima manfaat, pemerintah lokal, lokal dan sebagainya, yang menjadi dasar bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang ada, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya setempat.

Prinsip-prinsip

pemberdayaan masyarakat dibidang kesejahteraan masyarakat menurut Fadhil (2019:90):

1. Menumbuh kembangkan potensi masyarakat. Didalam masyarakat terdapat berbagai potensi

yang dapat mendukung keberhasilan program – program kesehatan. Potensi dalam masyarakat dapat dikelompokkan menjadi potensi sumber daya manusia dan potensi dalam bentuk sumber daya alam / kondisi geografis.

2. Mengembangkan gotong royong masyarakat. Potensi masyarakat yang ada tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya gotong royong dari masyarakat itu sendiri. Peran petugas provider dalam gotong royong masyarakat adalah memotivasi dan memfasilitasinya, melalui pendekatan pada para tokoh masyarakat sebagai penggerak kegiatan dalam masyarakatnya.
3. Menggali kontribusi masyarakat. Menggali dan mengembangkan potensi masing – masing anggota masyarakat agar dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan terhadap program atau kegiatan yang direncanakan bersama. Kontribusi masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, pemikiran atau ide, dana, bahan bangunan, dan fasilitas – fasilitas lain.
4. Menjalinkan kemitraan. Jalinan kerja antara berbagai sektor

pembangunan, baik pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat, serta individu dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang memungkinkan suatu kelompok (baca : masyarakat) mampu bertahan (*survive*) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dalam rangka mencapai tujuan bersama. dalam kerangka pemikiran ini, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui 3 (tiga) dimensi, yakni :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. titik tolak dari pemikiran ini adalah pemahaman bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. pemberdayaan dalam konteks ini diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyesuaian berbagai masukan serta

pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.

3. Melindungi, yakni dalam proses pemberdayaan harus dapat dicegah yang lemah menjadi bertambah kuat.

(Moeljarto, 2016:47).

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usaha nya memenuhi kebutuhan material dan spiritual nya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.

Secara umum teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, menurut Badrudin, (2017 : 54), yaitu :

- a. *Classical Utilitarian* menekankan bahwa kepuasan atau

kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kepuasan setiap individu dapat dibandingkan secara kuantitatif.

- b. *Neoclassical Welfare* menekankan pada prinsip *pareto optimality*.
- c. *Pareto optimum* sebagai sebuah posisi dimana tidak memungkinkan suatu realokasi input atau output untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang atau lebih buruk.
- d. *New contraction approach* menekankan pada konsep dimana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya.

Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, menurut Yuniarsih dan Suwatno (2018 : 131), yaitu:

- 1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial.
- 2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- 3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau

usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera Menurut Hasibuan (2017 : 180) dalam Yuniarsih dan Suwatno (2016 :118), Asas kesejahteraan masyarakat adalah keadilan dan kelayakan serta tidak melanggar peraturan legal pemerintah. kesejahteraan dilandaskan kepada lima asas yaitu :

- 1. Asas manfaat dan Efisien Kesejahteraan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Kesejahteraan ini hendaknya dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan.
- 2. Asas kebutuhan dan kepuasan Kesejahteraan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program kesejahteraan karyawan. Dalam hal ini perusahaan dapat memberikan santunan sebagai sarana dalam menunjang kesejahteraan karyawan.
- 3. Asas keadilan dan kelayakan Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program kesejahteraan karyawan. Dimana pihak perusahaan harus memberlakukan karyawannya dengan adil dan layak tanpa membedakan perbedaan kepentingan diantara karyawan.
- 4. Asas peraturan legal

Peraturan-peraturan legal yang bersumber dari Undang-Undang, Kepres dan keputusan menteri harus dijadikan asas program kesejahteraan karyawan. Peraturan-peraturan ini harus benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan untuk menghindari konflik antara pihak perusahaan dengan pegawai.

5. Asas kemampuan perusahaan
Pelaksanaan program kesejahteraan karyawan ini harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan perusahaan dan penghasilan yang didapat perusahaan. Maka kemampuan perusahaan menjadi tolak ukur dalam program kesejahteraan karyawan.

Kesejahteraan

masyarakat dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tapi juga ikut memperhatikan aspek masyarakat, mental dan segi kehidupan spiritual. Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, kesejahteraan masyarakat pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, yaitu :

1. Menanggapi kebutuhan manusia.
2. Usaha kesejahteraan masyarakat diorganisir guna menanggapi kompleksitas masyarakat perkotaan yang modern.

Usaha kesejahteraan masyarakat mengacu pada program, pelayanan, dan berbagai kegiatan yang secara konkret berusaha menjawab kebutuhan ataupun masalah-masalah yang dihadapi anggota masyarakat. Usaha kesejahteraan masyarakat dapat diarahkan pada individu, keluarga, kelompok atau komunitas Usaha kesejahteraan masyarakat yang searah dengan tujuan pembangunan ekonomi adalah:

- a. Beberapa tipe unit usaha kesejahteraan masyarakat yang secara langsung memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktifitas individu, kelompok ataupun masyarakat contohnya adalah pelayanan konseling pada generasi muda dan lain-lain
- b. Jenis usaha kesejahteraan masyarakat yang berupaya untuk mencegah atau meminimalisir hambatan (beban) yang dapat dihadapi oleh para pekerja (yang masih produktif).
- c. Jenis usaha kesejahteraan masyarakat yang memfokuskan pada pencegahan dampak negatif urbanisasi dan

industrialisasi pada kehidupan keluarga dan masyarakat atau membantu mereka agar dapat mengidentifikasi dan mengembangkan “pemimpin” dari suatu komunitas lokal. (Sumarnonugroho, 2017:55).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Fokus dalam penelitian ini didasarkan pada teori menurut Mubyarto (2017:97), tentang mengembangkan ekonomi kerakyatan dapat dilihat 3 (tiga) sisi, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim potensi masyarakat berkembang Pemberdayaan sebagai upaya untuk membangun potensi PMKS dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran untuk bangkit berkeaktifitas dalam menambah pendapatan melalui membuat kerajinan, memproduksi jajanan serta pelatihan produksi dan ketrampilan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat Pemberdayaan PMKS sebagai langkahh positif dan nyata, serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya melalui ketertiban administrasi dan pengolahan produk untuk bisa dijual dan mendapatkan keuntungan dari bantuan sosial yang diberikan.
3. Melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan

Pemberdayaan PMKS harus dapat ditingkatkan agar tidak menjadi lemah dan harus bangkit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tetap berkembang dan berproduktivitas nyata melalui pendampingan ketrampilan dan pelatihan berwirausaha mandiri.

Sumber data dalam penelitian kualitatif dengan mempergunakan pada dua sumber, yaitu :

1. Data Primer
Data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep dan pengelola dan pemberdayaan masyarakat yang menggerakkan dirinya untuk berwirausaha mandiri melalui bantuan sosial PMKS.
2. Data sekunder
Data yang diperoleh dari sumber data eksternal dan masyarakat yang telah mengetahui keadaan PMKS di Kabupaten Sumenep sebagai penunjang dalam penelitian yang mendukung validitas data primer, agar data akurat dan benar.

Subjek penelitian didasarkan pada “*social situation*” dari implementasi kebijakan, adalah :

1. Informan Kunci
Informan kunci dalam penelitian ini adalah Drs. Mustangin, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep
2. Informan Utama,
Informan utama adalah orang yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial PMKS di Kabupaten Sumenep yaitu Drs.

Fajarisman, M.Si Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

3. Informan Pendukung, Informan pendukung adalah orang yang dapat berperan aktif secara langsung dalam pengembangan dan peningkatan kesejahteraan hidup PMKS, yaitu Astutik Amriyani, S.Sos, M.Si, Sri Wahyuni, S.E, M.Si Ahli Muda Pekerja Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial.

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*)
Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.
2. Penyajian Data (*Data Display*)
Melalui data ini data dapat terorganisir tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Data dapat dilakukan dengan uraian singkat antar hubungan kategori dengan teks yang bersifat naratif, hal ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan (*concluting drawing*).
Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan

pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep telah bisa membangun strategi masyarakat PMKS dengan memberdayakan masyarakat melalui pemberian bantuan tunai melalui rekening maupun belanja modal berupa barang serta memberikan peralatan dan sarana pemberdayaan masyarakat, agar kehidupan masyarakat PMKS lebih sejahtera kehidupannya.

Salah satu program Dinas Sosial yang mampu memanfaatkan kondisi PMKS untuk sejahtera dengan Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan juga Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Program kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

1 Menciptakan Suasana Atau Iklim Potensi Masyarakat Berkembang

Menciptakan suasana masyarakat berkembang yang dilaksanakan Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dalam memberdayakan masyarakat PMKS, salah satunya penguatan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada wanita rawan sosial ekonomi, pemulung dan bagi pedagang kecil, dan anak terlantar sehingga mereka dapat berdaya dengan bantuan yang diberikan untuk dilakukan sebagai tambahan usaha produktif maupun bantuan uang tunai lewat transfer

Menciptakan suasana berkembang bagi masyarakat PMKS di Kabupaten Sumenep dengan memberikan bimbingan dan pendampingan teknis dalam berwirausaha mandiri serta memberikan pelatihan dalam membuat jajanan lokal dengan mendatangkan instruktur yang bisa mengembangkan masyarakat PMKS. Menciptakan suasana masyarakat berkembang bagi masyarakat Kebonagung, dengan diberikan bimbingan bantuan sarana dan prasarana melalui dana desa, sehingga masyarakat bisa menggali potensi yang dimiliki serta berwirausaha mandiri, agar dapat menambah kesejahteraan hidupnya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat. orientasi pemberdayaan haruslah membantu sasaran agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok, sedangkan peran petugas pemberdayaan masyarakat

(pendamping) sebagai *outsider people* adalah sebagai konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampai informasi.

Keadaan demikian menunjukkan adanya penguatan bagi masyarakat yang kurang mampu terutama bagi PMKS yang ada di Kabupaten Sumenep untuk bisa berdaya dan mampu menjalankan kehidupannya dengan membuka usaha kecil – kecilan termasuk juga dalam menjaga kehidupannya dengan hidup layak dimana bantuan tersebut dipergunakan untuk kehidupan dalam sehari-harinya. Pemberdayaan usaha ekonomi mikro tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan langsung pada para pelaku usaha yang nanti juga akan berdampak kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, keberadaan usaha ekonomi mikro tidak boleh diremehkan, justru harus mendapat perhatian yang lebih karena pada dasarnya para pelaku usaha ini masih memerlukan sentuhan pemberdayaan demi keberlangsungan usahanya.

2. Memperkuat Potensi Yang Dimiliki Masyarakat (Empowering)

Memperkuat potensi daya masyarakat PMKS yang diberdayakan Pemerintah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana peralatan untuk kewirausahaan serta peralatan sekolah bagi anak kurang mampu dan memberikan alat untuk membuat jajanan lokal dirumah agar dalam pekerjaan dalam memproduksi hasil produknya diterima di masyarakat lebih menunjukkan keasrian dan kualitas yang lebih baik, sehingga bisa menembus pasar, yang

akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep secara terus menerus memperkuat potensi masyarakat PMKS, dengan jalan memberikan bimbingan dan pelatihan maupun pendampingan kepada masyarakat dalam pemberdayaan dalam dirinya masyarakat termasuk pemuda desa untuk bisa memperkuat dirinya dengan kewirausahaan mandiri melalui potensi pemuda.

Pengembangan dan peningkatan sarana prasana peralatan dalam produktivitas masyarakat PMKS di Kabupaten Sumenep, telah menjadi kewajiban Pemerintah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, senantiasa membantu hal tersebut yang disesuaikan dengan usaha yang ditekuni termasuk memberikan pendampingan teknis kewirausahaan sehingga masyarakat desa dapat berjalan dengan lancar usahanya maupun dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat PMKS di Kabupaten Sumenep yang salah satunya dengan memberikan bantuan sosial kepada pemulung, yang tahun ini sebanyak 9 pemulung yang dapat bantuan dari UEP Tahun 2020, sehingga pemulung dapat berdaya dengan kewirausahaan mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal yang demikian telah memberikan arti bahwa Dinas Sosial mampu memberikan perlindungan kepada pemulung dengan memberikan bantuan uang tunai untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Hal yang demikian telah memberikan arti bahwa Dinas Sosial secara prosedural dalam pelaksanaannya sehingga ketepatan sasaran dan target dalam pendistribusian sesuai dengan ketentuan yang ada, dan apabila pelaksanaan tidak sesuai ketentuan bansos, maka akan berhadapan dengan hukum. Pemberdayaan sebagai bentuk membangun masyarakat dalam suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

3. Memberdayakan dan Melindungi Masyarakat Untuk Berkembang.

Memberdayakan dan melindungi masyarakat PMKS, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep untuk berkembang dan terus berkarya dalam kewirausahaan mandiri, dengan memberikan bimbingan dan arahan maupun pelatihan dalam peningkatan pengetahuan dalam mengolah sumber daya dengan mendatangkan instruktur yang dapat mengajak berpikir dalam menggali potensi dirinya serta penggalan potensi diri masyarakat, yang kesemuanya ini untuk pemberdayaan masyarakat PMKS, agar terlindungi dari ketidakberdayaan dan siap untuk menjadi masyarakat mandiri. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep senantiasa memberikan dukungan dana bantuan kepada masyarakat PMKS melalui berbagai Program Kegiatan yang ada, yang saat ini tahun 2024 juga memberikan anak yatim, piatu, anak yatim piatu

sebanyak 75 anak untuk kelengkapan sekolah

Memberdayakan dan melindungi masyarakat PMKS di Kabupaten Sumenep Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep untuk tetap berdaya dan mampu mengembangkan potensi kewirausahaan, dengan memberikan arahan dan pendampingan terutama dalam penggalian sumber daya masyarakat termasuk dalam memberikan bantuan tunai untuk dibelikan sarana dan barang yang bisa dipakai untuk berwirausaha mandiri agar bisa dalam meningkatkan kesejahteraannya. Desa Kebonagung dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk berwirausaha maupun peralatan kerajinan melalui dana desa untuk diberikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa berdaya dalam kehidupannya.

Sebagai bentuk implementasi dari pemberian kekuatan (*power*) kepada masyarakat, maka pada umumnya pemberdayaan dilakukan kepada sekelompok orang dan pemberdayaan adalah pemberian *accessibility*, meliputi pemahaman masalah kebutuhan, penguasaan dan kemampuan untuk mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki terarah untuk perbaikan nasib, sedangkan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, paham, termotivasi, berkesempatan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan masyarakat dalam melindungi agar terus maju dan berkembang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dengan memberikan arahan dan pendampingan lokal agar menjadi

masyarakat yang mandiri dengan produk rumahan seperti jajanan lokal desa serta kerajinan yang dihasilkan masyarakat yang mampu dipasarkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan pengembangan kelembagaan lokal daerah/desa.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Di Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep, mampu memanfaatkan kondisi masyarakat PMKS lebih sejahtera dan mampu menciptakan suasana masyarakat berkembang yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dalam memberdayakan masyarakat PMKS, salah satunya penguatan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada wanita rawan sosial ekonomi, pemulung dan bagi pedagang kecil, serta peralatan sekolah bagi anak kurang mampu dan memberikan alat untuk membuat jajanan lokal di rumah agar dalam pekerjaan dalam memproduksi hasil produknya diterima di masyarakat lebih menunjukkan keasrian dan kualitas yang lebih baik, dan juga memberikan bimbingan dan arahan maupun pelatihan dalam peningkatan pengetahuan dalam mengolah sumber daya dengan mendatangkan instruktur yang dapat mengajak berpikir dalam menggali potensi dirinya serta penggalian potensi diri masyarakat, yang kesemuanya ini untuk pemberdayaan masyarakat PMKS.

Berbagai saran alternatif yang dapat diberikan pada peningkatan kualitas kerja:

1. Penguatan bagi masyarakat PMKS hendaknya juga diperkuat dengan sarana kewirausahaan mandiri, serta pemberian pelatihan dalam pengembangan usaha dalam meningkatkan kesejahteraannya.
2. Perlindungan kepada masyarakat PMKS hendaknya Dinas Sosial, dengan memberikan bantuan kebutuhan hidup untuk setiap harinya dan juga pemberian pendampingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup agar kehidupannya lebih sejahtera
3. Penyokongan Dinas Sosial Kabupaten Sumenep kepada masyarakat miskin dengan memberdayakan masyarakat miskin dalam menjalankan kewirausahaan mandiri

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rukminto, 2018, *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Raja Grafindo. Persada.
- Abdul Hakim, 2017, *Dinamika Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, Semarang: EF Press Digimedia.
- Agus Rilo Pambudi, 2021, *Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Sosial*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 3(5) Oktober 2021
- Friedman, 2016, *Empowerment: The Politics of Alternative Development*.

Blackwell Publishers.
Cambridge, USA

- Geriya, 2016, *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, Nasional, Global Bunga Rampai Antropologi Pariwisata*. Denpasar, Penerbit Upada Sastra.
- Hutomo, Mardi Yatmo 2017, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Makalah. Disampaikan pada Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat di Bappenas.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2013 tentang *Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)*,
- Koentjaraningrat, 2016, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Mubyarto, 2019, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan*, Cet.Ke-1, Yogyakarta: Aditya Media,
- Marzuki Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Jakarta, Kencana,
- Moelyarto, Vidhandika dan Pranarka, 2017, *Pemberdayaan (Empowerment): Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta, CSIS
- Nugroho, Riant, Dwijowijoto, Wrihatnolo, Randy R. 2016, *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan*

- Masyarakat*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo,
Pambudi, Adhy, 2016, *Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani*. Bogor, Pustaka Wirausaha Muda.
Reksprayitno, Soediyono. 2016, *Pengantar Analisa Pendapatan Nasional*. Yogyakarta. Liberty.
Rosmedi Dan Riza Risyanti, 2016, *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang, Alqaprint Jatinangor.
Simarmata, 2018, *Reformasi Ekonomi*, Cetk. Ke-5, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI,
Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
Suharto, Edi, 2017, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung, Refika Aditama.
Sumodiningrat, Gunawan, 2017, *Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta, Kompas
Zulkarnain, 2016, *Membangun Ekonomi Rakyat :Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa,